

Katalog BPS : 9201001.8202

<https://halengkat.bps.go.id>

2019

INDIKATOR

EKONOMI

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

<https://haltengkab.bps.go.id>

2019

INDIKATOR

EKONOMI

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2019

ISBN: 978-602-6621-68-9

No. Publikasi: 82020.2025

Katalog: 9201001.8202

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 56 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:

-

Sumber Ilustrasi:

-

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh:

CV. Karunia Baru

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2019

Pengarah :

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum :

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis :

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting :

Bryandika Eri Pradana, S.Tr.Stat.

Penulis :

M. Arif Fakhruddin, SST

Pengolah Data :

M. Arif Fakhruddin, SST

Desain :

Mutia Elyani, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Buku Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2019 ini adalah kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini bertujuan antara lain untuk melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ke tahun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program, khususnya di bidang ekonomi.

Data yang disajikan dalam publikasi ini berupa tabel-tabel perkembangan harga, keuangan daerah, produksi, dan pendapatan regional serta potensi wisata. Bahan-bahannya dikumpulkan dan diolah oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah dan sebagian di antaranya merupakan data sekunder yang diperoleh dari dinas-dinas terkait.

Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi selanjutnya. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna data khususnya pemerhati masalah perekonomian.

Weda, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, SST., M. Si
NIP. 19800628 200212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Sistematika Penyajian.....	4
Bab 2 Produk Domestik Regional Bruto	5
Bab 3 Indeks Kemahalan Konstruksi.....	15
Bab 4 Keuangan dan Perbankan.....	25
A. Keuangan Daerah	27
B. Pajak Dan Retribusi	30
Bab 5 Produksi	35
A. Tanaman Pangan	37
B. Hortikultura	37
C. Peternakan	38
D. Perikanan	38
E. Perkebunan	40
Bab 6 Akomodasi dan Pariwisata	43
Bab 7 Transportasi	51
A. Transportasi Darat	53
B. Transportasi Udara	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dengan Persentase Lima Terbesar Kabupaten Halmahera Tengah (persen), 2015–2019.....	9
Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019.....	11
Tabel 3. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015-2019.....	13
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tengah Tahun 2019.....	22
Tabel 5. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2018-2019	29
Tabel 6. Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Penerimaan, 2018-2019.....	33
Tabel 7. Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2018-2019	34
Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016 dan 2017	40

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2015-201914
- Gambar 2. Peta Kabupaten Halmahera Tengah53
- Gambar 3. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2019.....54

<https://haltengkab.bps.go.id>

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Menciptakan kondisi masyarakat dengan keadaan yang lebih baik merupakan tujuan dari pembangunan suatu daerah baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dampak pembangunan daerah sendiri merupakan perwujudan dari upaya bangsa dalam melaksanakan strategi pembangunan nasional secara terpadu dan menyeluruh. Salah satu fokus pembangunan daerah adalah pembangunan daerah yang baru dibentuk akibat adanya pemekaran wilayah.

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan kabupaten yang mengalami pemekaran pada tahun 2003 menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu menjadi Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Setelah pemekaran terjadi, ibukota Kabupaten Halmahera Tengah yang dahulunya adalah Soasio, Tidore berpindah ke Kota Weda yang notabene merupakan kota baru. Hal ini menyebabkan pembangunan menjadi hal mutlak untuk digalakkan, baik pembangunan fisik wilayahnya maupun pembangunan sumber daya manusianya.

Pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah tentunya harus diawali dengan tahap perencanaan yang memerlukan informasi serta data yang lengkap, akurat dan tepat untuk menghindari resiko yang besar juga kesalahan dalam pembangunan suatu daerah. Informasi serta data tersebut dapat juga sebagai evaluasi keberhasilan dari pembangunan suatu daerah baik secara mikro maupun makro. Oleh karena itu, dibutuhkan satu indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan dan perkembangan ekonomi dari suatu daerah.

Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 merupakan kumpulan data statistik yang diharapkan mampu memberikan gambaran sampai sejauh mana keberhasilan atau perkembangan

perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah yang telah dicapai. Publikasi ini disusun berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan juga survei yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2019 adalah menyajikan data statistik ekonomi yang lengkap sehingga bermanfaat sebagai dasar penyusunan dan perumusan kebijakan yang akan diambil, serta digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan terarah serta sebagai bahan evaluasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan maupun hasil yang telah dicapai.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi ini terbagi menjadi tujuh bab. Bab pertama berisikan pendahuluan, yang berisi pengenalan tentang Indikator Ekonomi. Bab kedua membahas mengenai neraca keuangan (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Halmahera Tengah. Bab ketiga berisi tentang Indeks Kemahalan Konstruksi Halmahera Tengah. Bab keempat membahas mengenai keuangan daerah dan perbankan. Dalam pembahasan mengenai keuangan daerah, dijelaskan tentang bagaimana realisasi keuangan Halmahera Tengah selama satu tahun, meliputi pendapatan dan pengeluaran. Bab kelima berisi tentang produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Bab keenam membahas tentang potensi wisata Kabupaten Halmahera Tengah yang dapat dikembangkan serta jasa akomodasi sebagai penunjang kegiatan wisata. Bab terakhir membahas tentang perkembangan transportasi di Kabupaten Halmahera Tengah.

<https://halo.kab.bps.go.id>

BAB 2

Produk Domestik

Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan alat atau pendekatan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi dalam suatu kurun waktu di wilayah tertentu.

Perubahan demi perubahan telah banyak terjadi pada tatanan global dan lokal dan memiliki pengaruh terhadap perekonomian nasional selama beberapa tahun terakhir. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts 2008* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Terdapat dua macam penghitungan PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada kurun waktu tersebut, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2010) yang selanjutnya disebut sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk

melihat distribusi dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

Selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2019, perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Pertambangan dan Penggalan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2019 masih cukup tinggi, akan tetapi mengalami perlambatan jika dibandingkan pertumbuhan perekonomian pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2019 sebesar 6,61 persen yang artinya selama tahun 2019 telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,61 persen. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,99 persen dan mengalami perlambatan sebesar 0,38 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah beriringan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen. Angka ini sudah berada di atas target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 yaitu sebesar 5,3 persen.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dengan Persentase Lima Terbesar Kabupaten Halmahera Tengah (persen), 2015–2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengadaan Listrik dan Gas	17,82	24,63	8,21	1,68	9,55
2	Konstruksi	6,94	4,02	7,28	7,08	66,31
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,47	3,34	8,68	9,10	12,53
4	Informasi dan Komunikasi	8,78	4,68	6,77	4,69	13,74
5	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,63	2,85	2,48	3,45	10,43
PDRB		4,34	11,24	5,80	6,99	6,61

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Lapangan Usaha Halmahera Tengah 2015-2019

Berdasarkan tabel 1, ada lima lapangan usaha yang memiliki persentase laju PDRB terbesar jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha tersebut antara lain Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2019 adalah konstruksi yaitu sebesar 66,31 persen. Sektor konstruksi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,08 persen. Peningkatan ini didukung oleh beroperasinya PT IWIP di Halmahera

Tengah sehingga membuat pembangunan sektor konstruksi bertumbuh pesat.

Pada tahun 2019, sektor Informasi dan Komunikasi memiliki persentase laju pertumbuhan sebesar 13,74 persen. Sektor ini mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang persentasenya mencapai 4,69 persen.

Penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2019 mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 12,53 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan persentase sebesar 9,10 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh perpindahan penduduk yang cukup tinggi dari luar daerah Halmahera Tengah untuk bekerja di PT IWIP.

Berikutnya yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dimana pada tahun 2019 memiliki laju pertumbuhan sebesar 10,43 persen. Laju pertumbuhan sektor ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 3,45 persen.

Sektor lainnya yang termasuk lima sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 9,55 persen. Laju pertumbuhan sektor ini juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 1,68 persen. Pengadaan listrik mengalami pertumbuhan dikarenakan terdapat program dari desa untuk memberikan jatah pemasangan listrik gratis dari anggaran desa.

Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019

Kategori	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,71	25,46	24,35	22,60	21,88
B Pertambangan dan Penggalian	15,10	13,79	15,42	17,95	17,36
C Industri Pengolahan	2,70	8,41	8,91	10,31	6,16
F Konstruksi	8,19	7,74	7,87	7,88	12,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,93	14,96	14,88	14,59	14,71
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,17	19,92	18,80	17,25	17,82
Lapangan Usaha Lainnya	10,2	9,72	9,77	9,42	9,44
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Lapangan Usaha Halmahera Tengah 2015-2019

Terhitung sejak tahun 2015, perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah didominasi oleh enam kategori lapangan usaha, yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini terlihat dari besaran persentase pada tabel 2 untuk masing-masing sektor.

Berdasarkan tabel 2, sektor yang memiliki peranan terbesar terbesar bagi perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase sebesar 21,88

persen. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki persentase terbesar kedua dengan persentase 17,82 persen.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat, dimana pendapatan perkapita ini dapat didekati dengan PDRB Per kapita. Walaupun demikian, PDRB per kapita ini juga tidak secara langsung dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat. Oleh karena PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut, maka PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dua variabel tersebut. Dengan kata lain, jika nilai PDRB besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit maka PDRB per kapitanya akan menjadi besar, sebaliknya apabila nilai PDRB kecil sedangkan jumlah penduduknya besar maka PDRB per kapitanya akan menjadi kecil.

Tabel 3. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2015-2019

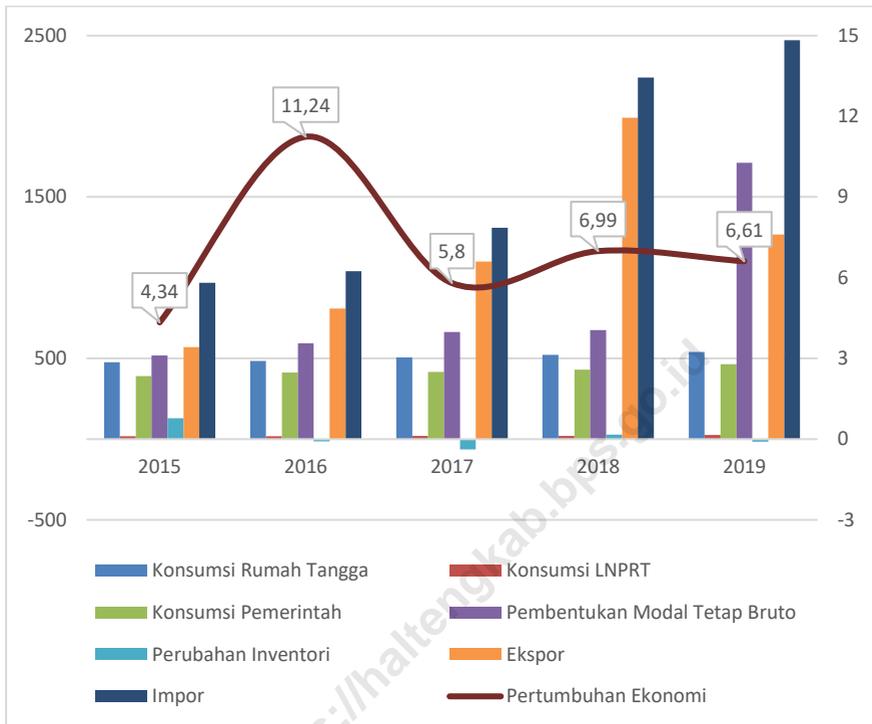
Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	30,99	34,47	36,57	39,64	43,22
- ADHK 2010	22,78	24,59	25,32	25,80	27,10
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	1,42	7,96	2,96	1,89	5,04
Jumlah penduduk (000 org)	49 807	51 315	52 813	55 370	55 728

Sumber : Publikasi PDRB Halmahera Tengah menurut Pengeluaran 2015-2019

Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 43,22 juta rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK), PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 sebesar 27,10 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 5,04 persen.

Selain penghitungan menurut berbagai sektor di lapangan usaha, PDRB juga dihitung menurut komponen pengeluarannya yaitu :

1. Pengeluaran Komponen Rumah Tangga
2. Pengeluaran Komponen LNPRT
3. Pengeluaran Komponen Pemerintah
4. Perubahan Inventor dan PMTB
5. Net Ekspor (Ekspor-Impor)



Gambar 1. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2015-2019

Sumber: PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2019

Pada Gambar 1 terlihat pertumbuhan nilai ekspor dan impor tahun 2015 hingga 2019 di Kabupaten Halmahera Tengah secara umum memiliki tren pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan impor pada tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun pertumbuhan ekspor lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingginya kebutuhan untuk memenuhi konsumsi mendorong tingginya impor barang dan jasa dari luar daerah Halmahera Tengah.

<https://tengkab.bps.go.id>

BAB 3

Indeks Kemahalan

Konstruksi

Salah satu cara untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah adalah diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan ini adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimbangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut meningkat.

Penerapan pembangunan yang telah terdesentralisasi memerlukan suatu indikator sebagai perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah. Ada beberapa komponen dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM), luas wilayah, PDRB per kapita, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU). IKK juga digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan

model. Untuk menghitung Indeks Kemahalan Konstruksi dibutuhkan beberapa komponen data yaitu data harga konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan data bobot/diagram timbang umum IKK kabupaten/kota berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 kelompok jenis bangunan.

Penghitungan IKK sudah dilakukan sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini, material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan dan kusen aluminium. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Beberapa hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, penghitungan IKK tahun 2018 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan BoQ sampai tahun 2017.

IKK tahun 2019 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 (empat) periode pencacahan yaitu Juli 2018, Oktober 2018, Januari 2019, dan April 2019. Seperti halnya IKK tahun 2018, IKK tahun 2019 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Periode pencacahan tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi, sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya

menggunakan dua periode pencacahan. Kota acuan penghitungan IKK 2018 adalah Kota Semarang.

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components (BOCC)*. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan *input* dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity (BoQ)*.

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan *input* dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* yaitu:

1. Gedung Bangunan
2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3. Bangunan Lainnya

Gedung dan bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan(*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, *krib*, dan *viaduk*.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.

- b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
- c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
- e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
- f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya yaitu bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Secara umum, pada tahun 2019, IKK Kabupaten Halmahera Tengah yakni sebesar 125,66 menempati posisi tertinggi ke-3 se-provinsi Maluku Utara. Secara implisit, hal ini menggambarkan bahwa secara umum, harga barang-barang konstruksi yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di Kabupaten Halmahera Tengah termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, bagi usaha sektor perdagangan bahan konstruksi serta bagi pelaku usaha sektor konstruksi di Kabupaten Halmahera Tengah.

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tengah Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	IKK
(1)	(2)
1. Kabupaten Halmahera Barat	117,89
2. Kabupaten Halmahera Tengah	125,66
3. Kabupaten Kepulauan Sula	131,27
4. Kabupaten Halmahera Selatan	108,10
5. Kabupaten Halmahera Utara	110,67
6. Kabupaten Halmahera Timur	117,62
7. Kabupaten Pulau Morotai	116,67
8. Kabupaten Pulau Taliabu	130,99
9. Kota Ternate	119,83
10. Kota Tidore Kepulauan	118,58

Sumber : Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2019

Banyak faktor yang memengaruhi harga barang dan jasa di suatu wilayah. Selain sisi permintaan dan penawaran, juga terdapat faktor lain seperti jumlah pedagang besar di suatu kota, kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi, jarak ke tempat asal barang, dan lain-lain. Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan sebagian besar bahan bangunan/konstruksi dari Manado melalui jalur laut menuju Pelabuhan Laut Weda. Sebagian besar bahan lainnya berasal dari Ternate melalui jalur laut menuju pelabuhan Sofifi dan dilanjutkan melalui jalur darat menuju ibukota Halmahera Tengah di Weda.

<https://haltengkab.bps.go.id>

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 4

Keuangan dan

Perbankan

A. KEUANGAN DAERAH

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sangat tergantung kepada sumber dana yang dimiliki. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk menjadi penggerak perekonomian pada daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh tiap tahunnya. Rencana dan realisasi keuangan daerah secara rinci tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun masa APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. APBD terdiri dari tiga poin penting yaitu pendapatan daerah, belanja daerah (pengeluaran daerah), dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah (Penerimaan Daerah) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Lain-lain Pendapatan yang Sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengeluaran daerah atau belanja daerah digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah (pengeluaran pembiayaan). Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. Jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah.

Setiap daerah diharapkan memiliki pendapatan yang tinggi dan dapat meningkat secara berkesinambungan, sehingga dana yang dibutuhkan untuk belanja daerah dapat tercukupi dan tidak mengalami defisit dalam arti pengeluaran lebih besar dari penerimaan yang ada.

Penerimaan daerah dalam APBD untuk tahun 2019 ditargetkan memiliki peningkatan dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan daerah untuk tahun 2018 tercatat naik sebesar 44,59 persen dengan nominal 1,023 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2017 tercatat 708,14 miliar rupiah. Apabila dilihat dari sisi pendapatan daerah, terdapat peningkatan sebesar 210,85 persen pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Pada tahun 2018 pendapatan daerah tercatat sebesar 700,42 miliar rupiah dan meningkat menjadi 860,98 miliar rupiah pada tahun 2019. Peningkatan pendapatan ini nyatanya dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 32,29 miliar rupiah dan dana perimbangan 33,49 miliar rupiah. Lain-lain Pendapatan yang Sah belum secara signifikan menunjang kenaikan pendapatan daerah naik sebesar 140,80 persen dari

angka 67,32 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 162,92 miliar rupiah pada tahun 2019.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2018-2019

Indikator	2018	2019	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	708,14	1023,90	44,59
Pendapatan Daerah	700,42	860,98	22,92
1. Pendapatan Asli Daerah(PAD)	15,31	47,60	210,85
2. Dana Perimbangan	617,79	651,28	5,42
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	67,32	162,10	140,80
Pembiayaan Daerah	7,72	162,92	2010,14
	683,02	1032,46	51,16
Pengeluaran Daerah	272,25	312,34	14,73
Belanja Tidak Langsung	168,37	180,57	7,24
1. Belanja Pegawai	0,00	11,95	-
2. Belanja Bunga	0,00	0,50	-
3. Belanja Subsidi	5,06	7,45	47,30
4. Belanja Hibah	0,00	0,00	-
5. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	-
6. Belanja Bagi Hasil	98,51	109,86	11,52
7. Belanja Bantuan Keuangan	0,30	2,00	566,43
8. Belanja Tidak Terduga	410,77	675,13	64,36
Belanja Langsung	21,37	15,82	-25,98
1. Belanja Pegawai	236,07	233,32	-1,17
2. Belanja Barang dan Jasa	153,33	425,99	177,83
3. Belanja Modal	0,00	45,00	-
Pembiayaan Daerah	708,14	1023,90	44,59

Sumber: Publikasi Statistik Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah 2019

B. PAJAK DAN RETRIBUSI

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Secara umum, menurut Dr. Mahfud Sidik, Msc. dalam artikel berjudul *'Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah'*, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2019 dianggarkan naik dibandingkan dengan realisasi APBD 2018. Terlihat bahwa kenaikannya cukup besar yaitu dari 7,72 milyar menjadi 162,92 miliar rupiah pada tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut, maka kontribusi pembiayaan terhadap penerimaan juga mengalami kenaikan dari 1,10 persen pada tahun 2018 menjadi 15,91 persen pada tahun 2019.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. Pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan. Ketiga, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. Keempat, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.

Tabel 6. Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Penerimaan, 2018-2019

Jenis Penerimaan		2018	2019*)
(1)		(2)	(3)
PENERIMAAN DAERAH		100,00	100,00
Pendapatan Daerah		98,90	84,09
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2,19	4,65
1	Pajak Daerah	0,32	0,40
2	Retribusi Daerah	1,11	1,00
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	0,75	3,24
Dana Perimbangan		88,19	63,61
1	Bagi Hasil Pajak	1,23	0,88
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	5,95	4,29
3	Dana Alokasi Umum	64,03	44,97
4	Dana Alokasi Khusus	17,00	13,47
Lain-lain Pendapatan yang Sah		8,52	15,83
Pembiayaan Daerah		1,10	15,91

Sumber : Publikasi Statistik Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019

Kontribusi PAD 2019 terhadap total penerimaan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dibanding PAD 2018, yaitu dari 2,19 persen menjadi 4,65 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan yaitu dari 15,31 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 47,60 miliar rupiah pada tahun 2019 (lihat tabel 6).

Kreativitas pemerintah daerah melihat dan mengembangkan potensi daerah menjadi hal yang mutlak untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Halmahera Tengah sebenarnya mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan. Salah satu contoh sebagai wilayah pesisir pantai,

potensi wisata bahari berpeluang sangat besar untuk dikembangkan. Kondisi lingkungan yang belum tercemar ditambah posisi Halmahera Tengah yang berdekatan dengan Kepulauan Raja Ampat membuat nilai wisata Halmahera Tengah cukup tinggi. Pembangunan fasilitas dan akses transportasi menuju daerah wisata wajib hukumnya jika ingin mendongkrak sektor pariwisata. Tentunya tanpa melupakan promosi ke masyarakat luas, terutama melalui dunia maya.

Tabel 7. Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2018-2019

Jenis Pengeluaran (1)	2018 (2)	2019*) (3)
PENGELUARAN DAERAH	100,00	100,00
Belanja Tidak Langsung	39,86	30,55
1. Belanja Pegawai	24,65	17,66
2. Belanja Bunga	-	1,17
3. Belanja Subsidi	-	0,05
4. Belanja Hibah	0,74	0,73
5. Belanja Bantuan Sosial	-	-
6. Belanja Bagi Hasil	-	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	14,42	10,74
8. Belanja Tidak Terduga	0,04	0,20
Belanja Langsung	60,14	65,05
1. Belanja Pegawai	3,13	1,55
2. Belanja Barang dan Jasa	34,56	21,84
3. Belanja Modal	22,45	41,66
Pembiayaan Daerah	-	4,40

Sumber: Data APBD Halmahera Tengah 2019

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 5

Produksi

A. TANAMAN PANGAN

Sektor pertanian Kabupaten Halmahera Tengah didominasi subsektor perkebunan dan perikanan. Sementara subsektor tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya lebih banyak diusahakan penduduk pendatang (transmigran). Ada tiga lokasi transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu di Kecamatan Weda Selatan, Weda Tengah, dan Weda Utara.

Kendala perkembangan subsektor pertanian tanaman bahan makanan berikut bisa menjadi pegangan dinas terkait dalam meningkatkan produksi pertanian yaitu: irigasi masih kurang bagus (sawah tadah hujan) mengakibatkan masa tanam hanya sekali atau maksimal dua kali dalam setahun; tingginya serangan hama tidak disertai dengan kemudahan mendapatkan pestisida, harga pupuk maupun pestisida mahal; akses transportasi masih menjadi kendala saat akan memasarkan hasil pertanian terutama di lokasi transmigrasi di Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara.

Pada tahun 2019, produksi padi di Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 907 ton yang dipanen dari area seluas 225 ha atau rata-rata 4,03 ton per hektar. Hasil ini menunjukkan penurunan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yang mampu menghasilkan 4.043 ton dari lahan seluas 997 hektar (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Maluku Utara).

B. HORTIKULTURA

Tanaman hortikultura yang diusahakan di Kabupaten Halmahera Tengah paling banyak pada tahun 2019 adalah kelompok cabai yang mampu menghasilkan 1.432 ton dari tanaman seluas 106 hektar. Cabai yang dimaksudkan terdiri dari Cabai Besar dan Cabai Rawit (Halmahera Tengah dalam Angka 2020).

C. PETERNAKAN

Ternak yang diusahakan di Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari sapi potong, kambing, babi, ayam kampung, itik dan itik manila. Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan menunjukkan bahwa jumlah populasi sapi potong pada tahun 2019 sebanyak 5.118 ekor, dimana populasi terbanyak terdapat pada Kecamatan Weda Selatan sebanyak 3.011 ekor sapi potong diikuti oleh Kecamatan Weda sebanyak 441 ekor.

Berikutnya, mengenai ternak kambing milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah, pada tahun 2019, jumlah populasinya sebanyak 9.119 ekor, dimana populasi terbanyak terdapat pada Kecamatan Patani sebanyak 2.083 ekor, diikuti oleh Kecamatan Patani Utara sebanyak 1.972 ekor.

Ternak ayam kampung milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah cukup merata di setiap kecamatan. Populasi ayam kampung pada tahun 2019 sebanyak 96.886 ekor, dimana populasi terbanyak terdapat pada Kecamatan Weda Selatan sebanyak 12.496 dan Kecamatan Weda sebanyak 12.495 ekor.

D. PERIKANAN

Lebih dari 70 persen luas Kabupaten Halmahera Tengah adalah lautan. Maka tidaklah heran potensi perikanan, terutama perikanan laut sangatlah besar. Sampai saat ini, kegiatan perikanan masih didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap. Tingkat pemanfaatan potensi perikanan baru mencapai angka sekitar 23 persen setiap tahunnya dari potensi lestari, sehingga peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Halmahera Tengah masih sangat terbuka. Komoditas perikanan tangkap di Halmahera Tengah meliputi :

- a) Ikan pelagis besar, seperti ikan tuna, cakalang, tengiri, tongkol
- b) Ikan pelagis kecil, misalnya teri, kembung, layang, selar, julung
- c) Ikan demersal/ikan karang/ikan dasar, contohnya ikan kerapu, kakap merah, ekor kuning
- d) Udang-udangan, meliputi lobster dan udang
- e) Rumput laut
- f) Teripang
- g) Mutiara dan jenis molusca

Musim ikan di Halmahera Tengah terjadi antara bulan Mei hingga Agustus dengan daerah persebaran ikan dimulai dari perairan Weda hingga ke perairan Patani dan Gebe. Keterbatasan jumlah dan jenis alat penangkap ikan yang tergolong tradisional merupakan salah satu faktor lambatnya pemanfaatan potensi perikanan karena armada tersebut hanya beroperasi di perairan lepas pantai dan tidak bisa menjangkau hingga daerah penangkapan *Zona Economy Exclusive* (ZEE). Untuk memaksimalkan produksi sektor perikanan di Kabupaten Halmahera Tengah, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti peningkatan sarana dan prasarana perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, peningkatan promosi perikanan bagi investor, dan perlindungan terhadap habitat ikan.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan, jumlah rumah tangga perikanan tangkap Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2019 sebanyak 820 rumah tangga yang keseluruhannya merupakan rumah tangga perikanan tangkat di perairan laut. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap terbanyak terdapat pada Kecamatan Weda. Pada perikanan budidaya, terdapat 247 rumah tangga yang bekerja di sektor tersebut, dimana jumlah terbanyak terdapat pada Kecamatan Weda Tengah sebanyak 95 rumah tangga.

Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Halmahera Tengah, 2018 dan 2019

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Laut <i>Marine</i> <i>Fisheries</i>		Perairan Umum <i>Inland</i> <i>Water</i>		Jumlah <i>Total</i>	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Weda	171	171	-	-	171	171
2 Weda Selatan	71	71	-	-	71	71
3 Weda Utara	71	71	-	-	71	71
4 Weda Tengah	55	55	-	-	55	55
5 Weda Timur	42	42	-	-	42	42
6 Pulau Gebe	66	66	-	-	66	66
7 Patani	83	83	-	-	83	83
8 Patani Utara	91	91	-	-	91	91
9 Patani Barat	79	79	-	-	79	79
10 Patani Timur	73	73	-	-	73	73
Halmahera Tengah	820	820	-	-	820	820

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah

Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, selama tahun 2019, jumlah perahu tanpa motor yang ada di Halmahera Tengah adalah 627 buah. Sedangkan jumlah motor tempel dan jumlah kapal motor masing-masing sebanyak 462 buah dan 12 buah.

E. PERKEBUNAN

Perkebunan sebagai bagian integral dari sektor pertanian merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranannya terlihat nyata dalam penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja,

pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku berbagai industri dalam negeri, perolehan nilai tambah dan daya saing serta optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Komoditas utama sektor perkebunan di Halmahera Tengah adalah kelapa, pala, cengkeh, dan kakao. Hasil tanaman perkebunan sebagian besar di-ekspor keluar Kabupaten Halmahera Tengah.

Pada tahun 2019, hasil tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu kelapa dan pala. Jumlah produksi kelapa mencapai 8.765,2 ton dengan luas tanam 10.321 hektar, sedangkan produksi pala sebesar 1.819,9 ton dengan luas tanam 13.341 hektar. Sementara itu, luas perkebunan cengkeh selama tahun 2019 adalah 1.491 hektar dengan produksi mencapai 214,7 ton. Untuk tanaman kakao, luas tanam sebesar 3.239 hektar dengan jumlah produksi mencapai 405,0 ton.

Kecamatan dengan produksi tanaman perkebunan terbanyak yaitu Kecamatan Patani Utara dengan produksi pala sebanyak 625,0 ton, produksi kelapa sebanyak 1.768,4 ton dan produksi cengkeh sebanyak 99,8 ton. Sedangkan produksi kakao terbanyak terdapat pada Kecamatan Patani dengan produksi sebanyak 124,0 ton.

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 6

Akomodasi

dan Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Halmahera Tengah didominasi wisata bahari karena kabupaten ini sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Berikut adalah beberapa tempat wisata di Kabupaten Halmahera Tengah :

1. Talaga Nusliko

Merupakan danau air payau di Desa Nusliko Kecamatan Weda. Berjarak 1,5 km di sebelah selatan dari pusat kota Weda. Luas danau ini mencapai 4 km², dikelilingi bukit, dan dapat digunakan untuk bersantai, memancing dan lain sebagainya. Pengunjung bisa menggunakan transportasi darat seperti mobil atau ojek sepeda motor.

2. Pulau Imam dan Pulau Dua

Adalah pulau di depan Kota Weda, tepatnya di depan Pelabuhan Weda, yang berjarak 500 meter dari pelabuhan. Di Pulau Imam, terdapat kuburan penduduk dan kuburan leluhur yang dikeramatkan dan biasanya banyak dikunjungi oleh peziarah.

3. Pulau Mnaili dan Pulau Yefi

Pulau Mnaili dan Pulau Yefi terletak di samping Pulau Imam. Pulau kecil yang tidak berpenghuni ini dikelilingi laut dangkal yang tenang dan dapat digunakan untuk memancing, *snorkling* dan sebagainya.

4. Taman Laut Tanjung Ulie

Terletak di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah. Berjarak 27 km dari Kota Weda, dapat ditempuh dengan jalan darat maupun lewat laut. Taman laut ini berdekatan dengan lokasi perusahaan tambang PT. Weda Bay Nickel. Hamparan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya serta ikan yang bewarna-warni memanjakan wisatawan yang berkunjung ke sana.

5. Taman Laut Pasi Gurango dan Pasi Dua

Berjarak 40 km dari pusat kota Weda. Terletak di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Dapat ditempuh melalui jalur laut maupun darat kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Pasi Gurango dan Pasi Dua merupakan pulau karang kecil dengan diameter sekitar 5 meter dan dikelilingi laut dangkal yang memiliki hamparan terumbu karang sepanjang 500 meter yang beraneka warna. Pengunjung juga disugahi pemandangan biota laut yang menawan dan masih alami.

6. Talaga Legaye Lol (Yonelo)

Merupakan sebuah danau air payau yang terletak di kaki bukit Legaye Lol di sebelah barat desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Panjang danau ini sekitar 2,5 km dan lebarnya 2,4 km. Di tengah danau terdapat pulau kecil bernama Yefi. Di dasar danau banyak terdapat kerang berprotein tinggi. Di ujung danau terdapat sebuah makam yang konon merupakan makam keturunan kesultanan Jailolo yang bernama Muhammad Taher.

7. Gua Boki Moruru

Merupakan sebuah gua alam di hulu sungai Sageyen, berjarak sekitar 5 km dari Desa Saga, Kecamatan Weda Utara. Pengunjung biasanya menempuh perjalanan menyusuri sungai Sageyen dengan menaiki perahu kecil atau biasa disebut *katinting* dengan lama perjalanan 30 menit. Nama gua ini diambil dari nama seorang putri yang konon pernah bermukim di kawasan ini. Boki Moruru berarti putri yang menghanyutkan diri. Menurut cerita masyarakat setempat, di sungai Sageyen pernah ditemukan seorang putri dari Kesultanan Tidore yang sedang mandi dan bermain-main sambil menghanyutkan diri mengikuti arus sungai Sageyen hingga ke hilir sungai.

8. Pulau Mtum Ya

Adalah sebuah pulau kecil yang terdiri dari hamparan pasir putih sepanjang 142 meter dan lebar 67 meter. Di dasar lautnya terdapat hamparan terumbu karang yang unik dan eksotik, serta ikan yang cantik menawan. Pengunjung harus menempuh perjalanan selama 2 jam dengan transportasi speedboat menuju Desa Messa, Kecamatan Weda Timur, kemudian baru menuju ke pulau ini dengan katinting dengan lama perjalanan kurang lebih 15 menit.

9. Tanjung Ngolo Popo dan Selat Jailolo

Merupakan sebuah tanjung yang terbentuk dari batu cadas (batu rijang), berlokasi di Desa Kipai, Kecamatan Patani. Tanjung ini berjarak 0,90 mil dari Desa Kipai. Di tanjung ini terdapat makam yang dikeramatkan dan sering dikunjungi peziarah. Sedangkan selat Jailolo memiliki hamparan terumbu karang yang masih alami di dasarnya.

10. Pulau Moor

Adalah sebuah pulau kecil dengan hamparan pasir putih. Berjarak kurang lebih 1 mil dari desa Kipai, Kecamatan Patani dan dapat ditempuh menggunakan transportasi laut dengan lama perjalanan 30 menit. Panjang pulau ini kurang lebih 2 km. Di dekat pantai Pulau Moor, terdapat sebuah danau yang dikelilingi oleh hutan bakau. Pulau ini bagus dijadikan tempat memancing atau *camping*.

11. Pulau Lewo dan Pulau Sayafi

Letaknya tidak jauh dari pantai Patani Utara. Panjang kedua pulau ini kurang lebih 3 km. Pulau ini digunakan sebagai lokasi perkebunan kelapa oleh masyarakat. Dapat digunakan pengunjung untuk memancing atau *camping*.

12. Kepulauan Gebe

Merupakan sebuah gugusan pulau yang terdiri dari Pulau Gebe, Pulau Fau, Pulau Yoi, Pulau Uta dan Pulau Sain. Berbatasan langsung dengan Kepulauan Raja Ampat yang sangat terkenal dengan wisata bawah lautnya di sebelah timur dan selatan. Untuk dapat mengunjungi kepulauan ini, dapat ditempuh dengan perjalanan laut maupun udara. Pulau Yoi merupakan salah satu pulau penghasil kepiting. Di Pulau ini terdapat penangkaran kepiting (ketang kenari) dan ikan yang diusahakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan pantai di Pulau Uta sering digunakan penyus sebagai tempat bertelur pada malam bulan purnama.

Selain terdapat banyak tempat wisata bahari, Halmahera Tengah juga kaya akan wisata budaya. Berikut beberapa contoh wisata budaya di Halmahera Tengah :

1. Coka Iba dan Fanten

Merupakan sebuah rangkaian atraksi budaya yang kerap diadakan oleh masyarakat Weda, Patani dan Gebe pada saat bulan Rabi'ul Awal. Pada zaman kesultanan, coka iba merupakan pasukan elit gam range yang ditugaskan menyamar menggunakan topeng. Kini coka iba menjadi sebuah atraksi budaya yang dilakukan pada saat perayaan fanten. Dalam menjalankan atraksinya, para pelaku coka iba menggunakan topeng menyerupai setan, menari diiringi tabuhan rebana dan alunan zikir. Coka iba merupakan perlambang atas kegembiraan alam termasuk setan dan iblis yang turut bersuka cita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fanten merupakan sebuah perayaan yang bermakna saling memberi tanpa pamrih dengan tujuan memupuk rasa persaudaraan antar sesama masyarakat gam range (tiga negeri). Konon, di awal perayaannya, melahirkan sumpah leluhur gam range yang terkenal dengan slogan fagogoru. Dalam perayaan fanten, masyarakat secara bergantian

menyajikan makanan untuk disantap oleh saudaranya yang kemudian akan dibalas oleh saudara keesokan harinya dengan menyediakan hidangan yang sama. Puncak perayaan fanten adalah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal.

2. Tari Lala

Lala berasal dari kata "*Laila*" diambil dari kalimat "*Lailahailallah*" yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Lala dalam bahasa Maba mengandung makna sebagai meja hidangan yang sering dilakukan pada upacara adat perkawinan dan upacara adat lainnya. Dari kisah itulah munculah tarian lala dalam sejarah masyarakat Gamrange. Tarian lala ini muncul bersamaan dengan berdirinya negeri Gamrange (Tiga negeri bersaudara) diantaranya adalah Maba, Patani dan Weda. Dalam perspektif sejarah, tarian lala sesungguhnya merupakan tarian khas masyarakat Gamrange yang mengandung unsur-unsur religius hingga sekarang tarian lala dijadikan sebagai sarana budaya dalam mempertemukan dan menyatukan masyarakat Maba, Patani dan Weda (Masyarakat Gamrange).

Ketersediaan jasa akomodasi (hotel) yang memadai berperan penting dalam menunjang industri pariwisata. Sebagai daerah yang baru berkembang, pada tahun 2016 tersedia 14 akomodasi di Kabupaten Halmahera Tengah, dengan jumlah kamar 142 dan tempat tidur sebanyak 242 dan rata-rata tamu yang menginap selama 7 hari. Kebanyakan tamu yang menginap masih tamu domestik. Penginapan ini tersebar di Kecamatan Weda, Weda Selatan, Weda Tengah, dan Pulau Gebe.

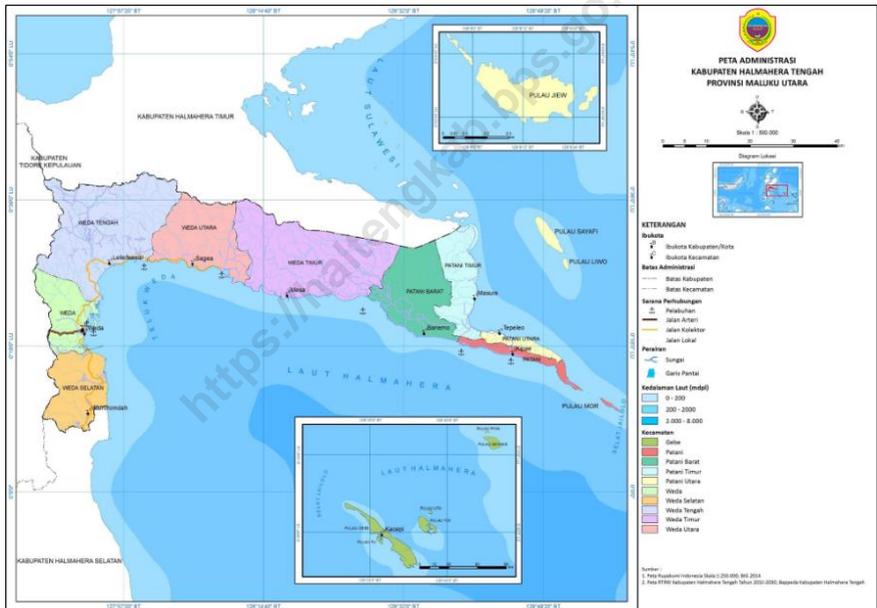
<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 7

Transportasi

A. TRANSPORTASI DARAT

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan daerah kepulauan dimana lebih dari 80 persen desa terletak di pesisir pantai. Kondisi transportasi darat yang belum menjangkau semua kecamatan di Halmahera Tengah mengakibatkan transportasi laut menjadi andalan mobilitas penduduk dari daerah satu ke daerah lain. Moda transportasi laut di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi kapal motor, kapal kayu dan *speed boat*.



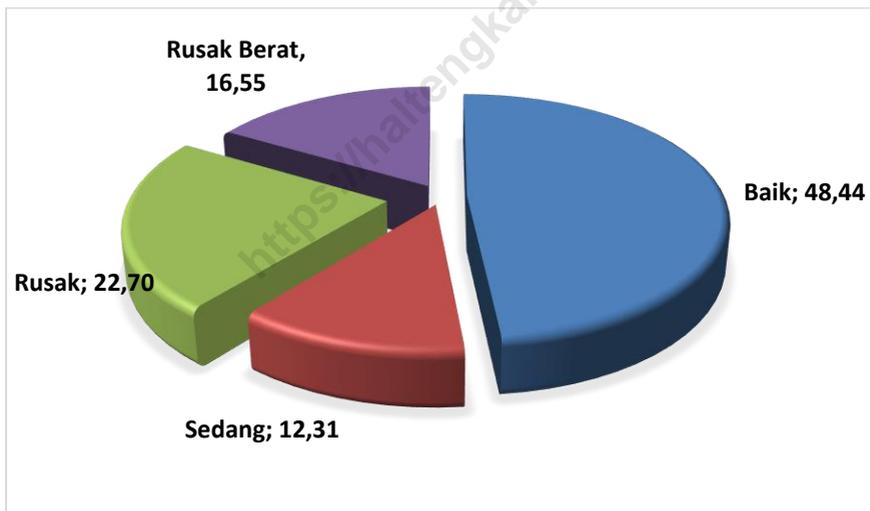
Gambar 2. Peta Kabupaten Halmahera Tengah

Sumber : Halmahera Tengah Dalam Angka 2019

Selain sebagai alat transportasi penumpang, moda transportasi laut juga sebagai alat pemasok berbagai barang kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar (solar, bensin, minyak tanah), semen, beras, dan sebagainya. Ekspor berbagai macam hasil perkebunan dan kehutanan masyarakat

Halmahera Tengah seperti kopra, kayu, bahkan nikel juga dilakukan melalui jalur laut.

Jalan merupakan sarana transportasi darat yang sangat penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Kondisi jalan yang baik akan mempermudah mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu wilayah ke wilayah lain. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, pada tahun 2019 sekitar 48,44 persen jalan di Halmahera Tengah dengan kondisi baik. Persentase panjang jalan dengan kondisi sedang adalah 12,31 persen. Adapun persentase panjang jalan dengan kondisi rusak adalah 22,70 persen serta sisanya 16,55 persen dengan kondisi rusak berat.



Gambar 3. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2019

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

B. TRANSPORTASI UDARA

Bandar Udara Gebe merupakan Bandar Udara Kabupaten Halmahera Tengah yang terletak di Kecamatan Pulau Gebe. Bandar Udara Gebe

beroperasi sejak tahun 1978 dengan jumlah maskapai hanya satu maskapai. Bandar Udara Gebe mulai beroperasi pada bulan Februari setiap tahunnya karena setiap bulan Januari masih dalam proses pelelangan maskapai yang akan beroperasi selama satu tahun ke depan.

Pada tahun 2019, jumlah penerbangan di Bandara Gebe adalah sebanyak 251 penerbangan dengan rata-rata 28 penerbangan setiap bulan. Jumlah penerbangan tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 32 penerbangan.

Jumlah penumpang pesawat yang berangkat dari Gebe ke Ternate pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.555 orang dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebanyak 338 orang. Sedangkan jumlah penumpang pesawat yang datang ke Gebe pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.012 dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebanyak 253 orang. Di sisi lain, banyaknya bagasi dan kargo yang dimuat dari Bandara Gebe pada tahun 2019 masing-masing adalah 188.484 kg dan 1.639 kg. Sedangkan banyaknya bagasi dan kargo yang dibongkar di Bandar Udara Gebe pada tahun 2019 masing-masing adalah 155.652 kg dan 351 kg.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KAB. HALMAHERA TENGAH**

Jl. Poros Weda-Payahe, Kecamatan Weda,
Kab. Halmahera Tengah 97853
Homepage: <http://haltengkab.bps.go.id>
E-mail: bps8202@bps.go.id

ISBN 978-602-6621-68-9



9 786026 621689 >